

PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN DESA MEMBANGUN (GERDEMA) PADA BIDANG PERKEBUNAN DI DESA DATA BARU KECAMATAN SUNGAI BOH KABUPATEN MALINAU

EFENDI¹

Abstrak

Artikel ini mengamati tentang pelaksanaan Program Gerakan Desa Membangun (Gerdema) pada Bidang Perkebunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Data Baru di Kabupaten Malinau dan kendala-kendala yang dihadapi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Secara keseluruhan disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Gerdema yang dimulai dari tahap sosialisasi, alokasi dana, pembagian bibit, pemeliharaan, pembentukan tim pendamping, pertanggungjawaban program, pelaksanaan dan penyelesaian telah berjalan dengan baik. Dalam proses pelaksanaan tersebut terdapat beberapa kendala diantaranya adanya keterbatasan kemampuan sumber daya manusia petani karena tingkat pendidikannya masih rendah, penyuluhan-penyuluhan masih sangat kurang. Selain itu tenaga pendamping Gerdema di lapangan masih kurang memberikan pembinaan kepada petani.

Kata Kunci : Perkebunan, Pelaksanaan program, Gerdema, Kabupaten Malinau

1. Pendahuluan

Dalam melaksanakan pembangunan, seluruh elemen Bangsa Indonesia berkeinginan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Melalui berbagai program pembangunan, diharapkan taraf hidup rakyat secara bertahap akan lebih baik. Sebagaimana yang diamanatkan dalam program pembangunan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang bahwa pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat.

Pembangunan Nasional Indonesia merupakan pencerminan kehendak untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan rakyat. Namun kearah tersebut diperlukan pemahaman masyarakat tentang pembangunan yang dirumuskan dan strategi pencapaiannya sehingga dapat terlaksana secara optimal. Keberhasilan pembangunan nasional yang dilakukan selama ini, ternyata belum menunjukkan performa fundamental ekonomi yang kokoh. Dampak dari krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia, telah mempengaruhi terpuruknya kurs rupiah dan terjadinya multi-krisis hampir pada semua lini kehidupan.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : efendidhy@yahoo.co.id

Dalam pembangunan sebenarnya bukanlah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, namun juga diperlukan partisipasi masyarakat. Tanpa ada dukungan yang kuat dari masyarakat, dimungkinkan hasil pembangunan kurang optimal.

Seerti yang dikemukakan Siagian bahwa “tugas pembangunan merupakan tugas dan tanggungjawab bersama suatu bangsa, tugas tersebut tidak memungkinkan diserahkan sepenuhnya pada pemerintah semata, tetapi juga perlu dukungan dari masyarakat”. Ini berarti pembangunan memerlukan kerjasama antar pemerintah dengan elemen masyarakat. Mencermati pendapat tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pembangunan merupakan perpaduan yang melibatkan kehendak pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Tema sentral mengiringi konsep pembangunan yang berbasis partisipasi adalah otonomi sebagaimana yang dijabarkan dalam konsep desentralisasi. Otonomi yang berarti penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan kata lain penyelenggaraan pemerintah sebagai urusan rumah tangga sendiri, yang meliputi perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan evaluasi hasilnya.³

Perkembangan sektor perkebunan merupakan salah sektor yang tak kalah pentingnya dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan sektor perkebunan merupakan hal yang sangat berkaitan langsung dengan pola hidup masyarakat di Kabupaten Malinau

Saat ini perkebunan di Desa Data Baru belum produktif, kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi. Selain itu, sosialisasi perkebunan belum terlaksana dengan baik, penyuluhan kepada petani kurang dilaksanakan, pemeliharaan perkebunan petani kurang ada perhatian dari petani tersebut, pupuk untuk petani belum ada dari pemerintah, serta organisasi tani masih lemah. Pengelolaan perkebunan petani belum optimal, sebagian lahan dibiarkan kebun dibiarkan terlantar hanya beberapa petani yang benar-benar mengelolanya.

Konsep pembangunan Kabupaten Malinau yang saat ini dengan Pola Program Gerakan Desa Membangun (Gerdema) perlu ditempatkan dalam tatanan pemberdayaan masyarakat secara luas. Melalui program Gerdema merupakan pembangunan milik rakyat dengan agenda pemulihan ekonomi nasional yang berpihak pada masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat secara nyata. Visi Kabupaten Malinau tahun 2011-2016 mengutamakan semangat “Gerakan Desa Membangun” gengan bertumpuh pada kekuatan rakyat, yaitu “Dari Rakyat dan Untuk Rakyat”. Paradigm Gerdema juga merupakan pembaharuan dari paradigma pembangunan sebelumnya, sebagai wujud konsistensi penerapan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan Desa sebagai suatu daerah otonom. Penetapan GERDEMA sebagai paradigma baru pembangunan Kabupaten Malinau menegaskan dan sekaligus meluruskan cita-cita Otonomi Desa. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Malinau 2011-2016 menegaskan sikap yang konsisten dalam

mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang menempatkan rakyat sebagai kekuatan pembangunan.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) pada Bidang Perkebunan di Desa Data Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau ?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat Pelaksanaan Program Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) pada Bidang Perkebunan di Desa Data Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau ?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dirumuskan maka tujuan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan Program Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) pada Bidang Perkebunan di Desa Data Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Program Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) pada Bidang Perkebunan di Desa Data Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau.

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai guna atau manfaat, sebagai berikut:

1. Secara teoritis : hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial, terutama ilmu pemerintahan dan khususnya dibidang manajemen pembangunan.
2. Secara praktis : hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah beserta jajarannya untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dibidang perkebunan.
3. Pihak lain, sebagai tambahan referensi bagi rekan-rekan yang memerlukan sumber data dalam melakukan penelitian dengan tajuk dan obyek Tugas Akhir yang sama.

2. Kerangka Dasar Teori

2.1 Kebijakan Publik

Menurut Carl Friedrich dalam Wahab (2012:9) kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan

adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan publik merupakan “apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan” Thomas R.Dye (dalam Winarto, 2008-17). Kebijakan publik itu menyangkut pilihan-pilihan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Budi Winarno (2008:33) sebagai berikut:

1. Tahap penyusunan agenda
2. Tahap formulasi kebijakan
3. Tahap adopsi kebijakan
4. Tahap implementasi kebijakan

2.2 Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah (desentralisasi) bisa diartikan dalam berbagai cara bergantung pada kepentingan-kepentingan dan perspektif dari masing-masing pengamat. Rondinelli dan Cheema dalam Said Mas'ud (2005:5) mendefinisikan otonomi daerah sebagai berikut: “Decentralization is the of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local administrative units, semi-autonomous and *parastatal* (italics in original) organization, local government or non-governmental organization. (otonomi daerah adalah proses pelimpahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi kepada unit-unit pelaksana daerah, kepada organisasi semi-otonom dan *parastatal*, ataupun kepada pemerintah daerah atau organisasi non-pemerintah).

Otonomi daerah menurut Said Mas,Ud (2005:6) otonomi daerah dipahami sebagai sebuah proses devolusi dalam sektor publik dimana terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

2.3 Konsep Pembangunan

Pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan Negara serta pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinan bangsa. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pembangunan memerlukan suatu perencanaan yang matang dan dilakukan secara sadar menuju suatu perubahan yang lebih baik. Menurut Abe (2005: 51) perencanaan pembangunan daerah merupakan proses menyusun langkah-langkah yang akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan daerah dapat dipandang sebagai formulasi (rumusan) mengenai aspirasi masyarakat setempat, dalam rangka mencapai suatu kehidupan baru yang lebih baik dan bermakna melalui langkah-langkah pembangunan. Dalam hal ini dikenal dua model perencanaan pembangunan:

1. Perencanaan pembangunan yang ditentukan langsung oleh pusat sehingga pemerintah daerah hanya merupakan pelaksana atau pelengkap dari konsep yang sudah ada.
2. Perencanaan merupakan hasil dari pergulatan masyarakat setempat dengan menggunakan mekanisme formal dan non formal yang ada.

2.4 Pemberdayaan Masyarakat

Berbicara tentang pemberdayaan berarti berbicara tentang proses penguatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Parson (dalam Suharto, 2005:58-59) pemberdayaan adalah sebuah proses dengan dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Menurut Rappaport (dalam Hikmat, 2004: 3) “Pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang. Menurut Mayo (dalam Hikmat 2004: 3) partisipasi, merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru.

Sedangkan menurut Suharto (2005: 58), pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas dari mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Dipihak lain, Mikkelsen (dalam Sumaryadi, 2005: 100) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah model pembangunan alternatif yang dirumuskan oleh masyarakat dan organisasi setempat. Pengertian ini mengandung beberapa asumsi pertama, masyarakat harus memperoleh proyek pembangunan yang mereka sendiri tentukan. Kedua, masyarakat memiliki kemampuan dan hak untuk menyatakan pikiran serta kehendak mereka. Ketiga, tujuan pembangunan dapat dicapai secara harmonis dan konflik antar kelompok masyarakat diredam melalui

pola demokrasi setempat. Keempat, pembangunan menjadi positif bila ada partisipasinya.

2.5 Program Gerakan Desa Membangun

Program Gerdema merupakan suatu gerakan pembangunan yang terpadu, sinergis dan partisipatif dengan memfungsikan segala sumber daya yang ada pada semua tingkatan pemerintah yang ada di kabupaten malinau, dengan tujuan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing kecamatan kabupaten malinau secara adil dan merata, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Yansen (2013: 486-501) Terdapat tujuh prinsip dasar yang harus dipegang dalam implementasi Gerakan Desa Membangun, yaitu:

- a) Desa merupakan wilayah terkecil dalam pemerintahan NKRI, namun sesungguhnya menjadi penentu keberhasilan pembangunan, karena telah dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat tinggal di perdesaan, sehingga jika seluruh masyarakat desa maju, maka menggambarkan masyarakat kabupaten juga akan maju, cermin kemajuan kabupaten adalah presentasi dari kemajuan desa yang terwujud melalui kesejahteraan masyarakat desa.
- b) Kepercayaan sepenuhnya diberikan kepada Pemerintah Desa, sehingga mereka dapat merencanakan pembangunan desanya, melaksanakan rencana pembangunan tersebut dan mengawasi pelaksanaannya secara penuh.
- c) Semangat dan inisiatif membangun datang dari masyarakat desa, karena masyarakat desalah yang mengetahui dan memahami kebutuhan dasar desanya.
- d) Desa bebas menyusun kebutuhan desanya, sejauh relevan dengan kebutuhan mayoritas masyarakat desa, bebas menetapkan orientasi program pembangunan desanya, bebas menetapkan sasaran program pembangunan desanya dan bebas menetapkan target-target pencapaian program pembangunan desanya, bebas melaksanakan tindakan pengendalian kegiatan pembangunan desanya dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan percepatan pencapaian target pembangunan desanya.
- e) Penguatan dan pemanfaatan potensi dan kearifan lokal di desa harus diutamakan, agar pembangunan desa yang dilaksanakan menjadi tepat sasaran dan terasa manfaatnya.
- f) Terbangunnya desa-desa sesuai dengan karakteristik potensi dan kearifan lokalnya, karena melalui Gerdema bukan penyeragaman pembangunan desa yang dikehendaki tetapi pembangunan desa yang memiliki karakteristik sesuai dengan potensi yang ada di desa tersebut.
- g) Terwujudnya anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang terkelola dengan baik, transparan dan akuntabel dalam penggunaannya.

2.2 Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional yang akan dikemukakan disini dimaksudkan untuk memberikan batasan atau untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda dari

berbagai pihak. Maka untuk membatasi konsep pelaksanaan Program GERDEMA Pada bidang perkebunan adalah pelaksanaan dari kegiatan yang terencana dalam rangka pembinaan masyarakat yang berorientasi pada pembangunan di daerah khususnya pada perkebunan di Desa Data Baru, meliputi sosialisasi perkebunan, pelaksanaan perkebunan guna mewujudkan desa yang mandiri dalam arti memiliki kemampuan untuk menggunakan potensi yang dimilikinya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

3. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan atau mengungkap keadaan yang sebenarnya sesuai dengan keadaan dilapangan.

Analisis data yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Milles dan Huberman (1992:20), analisis data deskriptif kualitatif, mencakup: Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan/verifikasi.

3.1 Fokus Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan Program Gerakan Desa Membangun di Kabupaten Malinau terkait dengan Perkebunan di Desa Data Baru meliputi :
 1. Sosialisasi
 2. Alokasi dana
 3. Pembagian bibit
 4. Pemeliharaan
 5. Pembentukan tim pendamping
 6. Pertanggung jawaban program

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari informan yang dapat dipercaya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindarkan adanya informasi data yang bias.

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2006: 157) sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball sampling*. Dalam menggunakan teknik *purposive sampling* ini, peneliti menunjuk informan yang dianggap memahami dan mengerti tentang indikator penelitian dan pembangunan perkebunan di Desa Data Baru

dalam proses wawancara . Adapun *key informan* dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Data Baru.

Untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari *key informan*, maka peneliti melanjutkan pencarian data kepada informan yang menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang awal mula jumlahnya sedikit, tetapi karena data yang didapat dari informan tersebut masih kurang, maka peneliti mencari informan lain yang dianggap lebih tahu dan dapat melengkapi data yang sebelumnya terutama yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan melalui program Gerdema. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Ketua LPM
2. Sekretaris Desa
3. Petugas Penyuluh Lapangan
4. Satgas Gerdema
5. Petani 5 (lima) orang

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: Data Primer dan sekunder. Data Primer diperoleh melalui informan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dan dipandu melalui pedoman wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang relevan dengan fokus penelitian, dan buku referensi yang menunjang penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan cara dan teknik sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Liberary Research*) Penelitian Kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan perpustakaan sebagai sumber data dengan mencari data berdasarkan literatur dan buku-buku yang relevan, dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan dan lainnya berhubungan dengan penelitian ini.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)
 - a. Observasi
 - b. Wawancara (*Interview*)
 - c. Dokumen

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1992: 20) teknik analisis data terdiri dari 4 komponen, yaitu :

1. Tahap Pengumpulan Data
2. Tahap Reduksi
3. Tahap Penyajian Data
4. Tahap Penarikan Kesimpulan

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Data Baru mempunyai 2 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 256 jiwa dengan 59 kepala keluarga (KK).

Secara administratif Desa Data Baru yang berada di kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Desa Long Top
2. Sebelah Selatan : Desa Agung Baru
3. Sebelah Barat : Desa Long Lebusan
4. Sebelah Timur : Desa Mahak Baru/Dumu Mahak

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Pelaksanaan Program Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) pada Bidang Perkebunan di Desa Data Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau

4.2.1.1 Sosialisasi

Pelaksanaan Program Gerakan Desa Membangun (Gerdema) khususnya pada bidang perkebunan ini melibatkan banyak pihak yang di mulai dari tingkat kabupaten yaitu dinas-dinas terkait, kecamatan sampai dengan desa kemudian turun kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan program Gerdema pada bidang perkebunan Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk pembuatan percontohan kebun karet, sehingga tidak dalam pengumpulan dan pengarahan kepada masyarakat. SKPD Pemerintah Kabupaten Malinau yaitu Dinas Perkebunan melaksanakan percontohan kebun karet di kecamatan sungai boh yang terdiri dari 6 desa yang ada di kecamatan sungai boh. Masing-masing desa yang ada di kecamatan sungai boh hanya 2 orang petani dijadikan sebagai percontohan dalam membuka lahan kebun karet. Dengan adanya percontohan kebun karet tersebut diharapkan ada keinginan untuk berkebun.

4.2.1.2 Alokasi Dana

Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa serta kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, perlu didukung dengan pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dana Gerakan Desa Membangun merupakan satu sumber pendapatan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes pada tahun anggaran berjalan. Penggunaan dana Gerdema sepenuhnya kewenangan desa yang disusun dalam bentuk kegiatan dan program dengan tetap mengacu kepada 4 pilar pembangunan Kabupaten Malinau Yaitu sebagai berikut:

- a. Bidang Peningkatan Ifrastruktur
- b. Bidang Peningkatan SDM
- c. Bidang Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
- d. Bidang Ketatalaksanaan Pemerintah/Reformasi birokrasi

Di Desa Data Baru, secara umum bantuan dana Gerdema tahun 2012 sebesar Rp. 1.200.000.000 yang terdiri dari pembiayaan penunjang administrasi dan operasional desa, penunjang sarana dan prasarana desa, penunjang sumber daya manusia dan pembangunan pertanian dalam arti luas. Alokasi dana Gerdema di Desa Data Baru untuk pengembangan sektor pertanian khususnya perkebunan karet yaitu sebesar Rp. 286.600.000 dalam tahun anggaran 2012, dengan pembiayaan kegiatan pembukaan lahan perkebunan karet, belanja bibit karet, dan upah tim pelaksana kegiatan Gerdema.

4.2.1.3 Pembagian Bibit

Pembukaan lahan mulai dilaksanakan pada bulan September tahun 2012, mekanisme pembagian bibit karet di Desa Data Baru yaitu dibagi kepada tiga kelompok tani, jumlah petani 55 orang, terdapat 49 orang yang memiliki kebun karet sedangkan yang tidak memiliki kebun karet 6 orang. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) bersama tim pelaksana kegiatan Gerdema membagikan bibit karet kepada yang sudah siap lahannya setiap petani mendapatkan 250 pohon bibit karet, sedangkan petani yang belum siap lahannya untuk mendapatkan bibit karet tersebut harus siap lahannya, setelah petani tersebut menyiapkan lahannya kemudian melaporkan kepada PPL atau tim pelaksana kegiatan Gerdema untuk mendapatkan bibit karet. Dengan pembagian luas lahan 0,5 hektar setiap anggota petani, luas keseluruhan perkebunan karet di Desa Data Baru pada Tahun 2013 seluas 25,5 hektar.

4.2.1.4 Pemeliharaan

Untuk mendukung pelaksanaan program Gerdema tidak terlepas dari partisipasi masyarakat supaya program tersebut tercapai dengan yang diharapkan. Salah satu partisipasi masyarakat dengan terus aktif memelihara dan merawat tanaman karetnya. Pemeliharaan perkebunan karet dikelola oleh petani itu sendiri dari tahap pembukaan lahan sampai pemeliharaan membersihkan kebun karetnya. Allokasi dana yang dianggarkan untuk biaya pemeliharaan kebun karet tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 78.600.000 yang terdiri dari belanja barang dan upah tim pelaksana kegiatan Gerdema. Belanja barang yaitu Racun Herbisida sebanyak 400 botol, setiap petani karet mendapat 8 botol racun herbisida. Sedangkan upah tim pelaksana kegiatan Gerdema sebesar Rp. 1.400.000.

4.2.1.5 Pembentukan Tim Pendamping

Pendamping adalah tenaga lapangan pada tingkat kecamatan dan desa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk membantu masyarakat mengembangkan usahanya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gerdema.

Dasar pembentukan tim pendamping adalah karena anggaran dana Gerdema yang jumlahnya besar perlu ada yang mendampingi untuk mengelola anggaran dana Gerdema, supaya tidak terjadi penyimpangan anggaran dana

Gerdema dan upaya pemerintah daerah mensejahterakan masyarakat desa yang ada di Kabupaten Malianu.

Mekanisme pembentukan tim pendamping dilakukan sebagai berikut:

1. Seleksi dilakukan untuk calon pendamping yang telah di tentukan sesuai dengan standard kelulusan dan mempunyai pengalaman kerja 2 tahun.
2. Dilakukan tes dalam 2 tahapan antara lain; tes tertulis dan tes wawancara.
3. Peserta yang lulus akan dibekali dengan pengetahuan tentang tapoksi mereka di lapangan.

4.2.1.6. Pertanggungjawaban Program

Pelaporan sangat penting dilakukan dalam rangka pengendalian dana untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan dana Gerdema. Bentuk pertanggungjawaban terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. Maka setiap bulan pelaksana Gerdema Desa Data Baru wajib membuat laporan fisik dan keuangan pelaksanaan Gerdema Desa dan laporan akhir.

Adapun bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Gerdema sebagai berikut:

1. Laporan berkala yaitu; laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana alokasi dana desa dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini, realisasi penerimaan alokasi dana desa dan realisasi belanja alokasi dana desa.
2. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup, perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan alokasi dana desa.

4.3 Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Gerakan Desa Membangun pada Bidang Perkebunan di Desa Data Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau

Faktor yang menjadi pendukung berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan penelitian, terdapat faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Gerakan Desa Membangun pada Bidang Perkebunan di Desa Data Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau yaitu, Dana Gerdema, Partisipasi Masyarakat/Respon yang positif dari masyarakat dalam program Gerdema.

4.4 Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) pada Bidang Perkebunan di Desa Data Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau

Faktor penghambat dalam pelaksanaan program kegiatan Gerdema yaitu, sumber daya manusia yang lemah atau adanya petani yang kurang respon, kinerja

kerja tenaga pendamping Gerdema dan tenaga PPL masih kurang dan pelatihan yang dilakukan masih kurang.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada fokus penelitian yang penulis temukan, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Gerakan Desa Membangun pada Bidang Perkebunan di Desa Data Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dalam bentuk pembuatan percontohan kebun karet, terdapat dua orang petani dijadikan percontohan kebun karet di desa data baru.
2. Dana untuk pembukaan dan pemeliharaan perkebunan bersumber dari APBD Kabupaten Malinau. Alokasi dana yang diperuntukkan pembukaan lahan pada tahun 2012 sebesar Rp. 286.600.000, sedangkan untuk pemeliharaan sebesar Rp. 78.600.000.
3. Pembagian bibit karet di desa data baru dibagi kepada kelompok tani, setiap anggota yang terdaftar dalam kelompok tani mendapatkan 250 pohon bibit karet.
4. Pemeliharaan perkebunan masyarakat di Desa Data Baru dalam pelaksanaan program Gerdema khususnya perkebunan, dikelola oleh petani sendiri dari tahap pembukaan lahan sampai pemeliharaan membersihkan kebun karet dengan menggunakan racun herbisida. Bantuan untuk pemeliharaan perkebunan masyarakat di Desa Data Baru seperti racun Herbisida terealisasi dengan baik. tenaga Petugas Penyuluh Lapangan memberikan penyuluhan langsung terjun ke lapangan secara individu jika petani membutuhkan.
5. Satgas Gerdema sebagai pendamping dalam pelaksanaan Gerdema kurang berperan aktif dan masih belum optimal dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai pendamping Gerdema di Desa Data Baru dan tenaga PPL kurang memberikan penyuluhan kepada petani.
6. Pertanggungjawaban kegiatan program Gerdema terdiri dari :
 - a. Laporan Berkala, yaitu ; laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibuat secara rutin setiap bulan, adapun yang dimuat dalam laporan ini yaitu, realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan realisasi belanja Alokasi Dana Desa (ADD).
 - b. Laporan Akhir dari Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). pertanggungjawaban program kegiatan Gerdema di Desa Data Baru berjalan dengan baik.
7. Faktor pendukung dalam Pelaksanaan Program Gerakan Desa Membangun khususnya bidang Perkebunan adalah bantuan dana maupun peralatan dari pemerintah Kabupaten Malinau , serta tingginya partisipasi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam program tersebut.

8. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Gerakan Desa Membangun khususnya pada bidang Perkebunan adalah keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia di Desa Data Baru.

Saran – Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis telah buat, maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran yang nantinya diharapkan menjadi suatu masukan untuk dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat:

1. Program Gerdema khususnya perkebunan terus berlanjut supaya masyarakat desa berdaya dan ekonomi masyarakat bertumbuh, untuk keberhasilan program pemberdayaan masyarakat diperlukan sinergitas antara berbagai komponen yang terlibat yaitu aparatur Pemerintah Daerah (pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa); non-pemerintah; pendamping profesional; dan tokoh masyarakat.
2. Pemerintah perlu menyediakan pemasarannya dengan membuka koperasi dan bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Koperasi (DISPERINDAKOP), maupun swasta sehingga hasil karet petani bisa dipasarkan.
3. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia petani perkebunan karet, perlu diadakan Pelatihan-pelatihan atau penyuluhan dari Dinas Perkebunan kepada petani.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal Said. 2006. *Kebijakan Publik*. Suara Bebas. : Jakarta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- _____ 2012. *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Anderson, 1979. *Policy Implementation of Administrative*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Haris, Syamsuddin (Ed). 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. LIPI Press : Jakarta.
- Hikmat, Harry. 2009 *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif ekonomi dan lingkungan*. LP3ES : Jakarta.
- Kartasmita, Ginanjar. 1996. *Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. LP3ES: Jakarta.
- Kuncoro Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN : Yogyakarta.
- Mashoed, 2004. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Papyrus: Surabaya.

- Milles B, Mathew dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumer Tentang Metode-metode Baru*. Diterjemahkan oleh TR Rohidi Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung Rosdakarya.
- Said Mas, Ud, 2005. *Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesiat*. Copyright UMM press : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Aplikasi*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Soekartawi. 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan: Dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah*. CV. Rajawali. Jakarta.
- Syamsi, Ibnu. 1988. *Pokok-pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemograman dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*. CV Rjawali : Jakarta.
- Syaukani. (et al) 2003. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Wahab. Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan: dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Winarno Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo . Yogyakarta.
- Yansen. 2013. *Gerakan Desa Membangun, Sebuah Ide Inovatif Tentang Pembangunan Desa*. PT. Danar Wijaya: Malang.

Dokumen:

- Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang No. 10 Tahun 1999 Tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Peraturan Bupati Malinau No. 31 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dana Gerakan Desa Membangun.
- Laporan Pertanggungjawaban Desa Data Baru Tahun 2012

Sumber Website:

- Elia Dian. 2013. "Macam-macam Kriteria Kemiskinan". (<http://eliadian.blogspot.com/2013/macam-macam-kriteria-kemiskinan.html>, diakses 3 desember 2013).